

**PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM**

**SKRIPSI**



Oleh

**Debby Chynthia  
151010023**

**PRORAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Debby Chynthia  
151010023**

**PRORAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Debby Chynthia  
NPM : 151010023  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI  
KELAS I KHUSUS BATAM”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, sata bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 20 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

**Debby Chynthia**

**151010023**

**PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Debby Chynthia  
151010023**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 20 Februari 2020**

**BOBBY MANDALA PUTRA. S.IP., M.Si  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Kota Batam merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang padat. Jumlah penduduk yang padat menuntut untuk hadirnya lapangan kerja yang banyak. Seiring perkembangan zaman juga menuntut persaingan yang ketat antara pekerja. Batam sebagai kota industri menyebabkan banyak tenaga kerja asing (TKA) yang datang ke Batam untuk bekerja. Dengan begitu pemerintah melalui Imigrasi Klas I Khusus Batam dituntu untuk melakukan pengawasan secara maksimal, agar mencegah adanya TKA ilegal yang bekerja di kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencoba menjelaskan dan menggambarkan proses dan tindakan yang dilakukan Imigrasi Klas I Khusus Batam dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imigrasi Klas I Khusus Batam sudah melakukan pengawasan sesuai dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dari proses pengawasan di lapangan. Hal tersebut dalam dilihat pada indikator yang digunakan, yaitu penentuan standar pelaksana, penentuan pengukuran pelaksana kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi.

**Kata Kunci:** Pengawasan, TKA, Imigrasi

## **ABSTRACT**

Batam City is a city with a dense population growth. A dense population demands large jobs. Along with the times also requires intense competition between workers. causes many foreign workers who come to Batam to work. That way the government through Batam Special Class I Immigration is forced to carry out maximum supervision, to prevent the existence of illegal TKA who work in the city of Batam. This study aims to determine and analyze the supervision of foreign workers by immigration office of Class I specifically Batam. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. In this research the researcher wants to try to explain and describe the process and actions taken by Batam Special Class I Immigration under the supervision of Foreign Workers. The results of this study indicate that the Special Class I Immigration Batam has supervised in accordance with the specified implementation standards, but there are still deficiencies that must be improved from the supervision process in the field. This is seen in the indicators used, namely the determination of implementing standards, determining the measurement of implementing activities, measuring the implementation of activities, comparison of implementation with standards and analysis of deviations, and taking corrective actions.

**Keyword:** *Supervision, TKA, Immigration*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu S1 pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP.,M.Si. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Negara.
5. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP selaku Pembimbing Akademik pada Program Studi Administrasi Negara.

6. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Negara dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Bapak Baginda Raja Harahap selaku Intelijen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.
8. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam yang telah membantu penulis selama penelitian.
9. Bapak Muhammad Hasan dan Mama Tumini yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungan terbaik, serta selalu menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Saudara-saudara tercinta Deasy Haryani dan Della febryani yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan menganggu Peneliti.
11. Teman-teman yang selalu setia menemani, membantu dan memberi semangat Aidil Alimudin, Ferianto kasmadi, Firman Al-Haadi, Irfan Syahreza, Frisma Kusuma Dewi dan Vivi Kurniati
12. Teman-teman Johana Mikawati, Oktarizal Saputra dan Uray Yuditia yang peneliti cintai
13. Teman-teman uniqlo sayang Hamzah Somat, Setyo Purwo, Novi Lenti dan Lala yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 yang penulis sayangi.



Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini, dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Aamiin.

Batam, 20 februari 2020

Debby Chynthia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Konsep Pengawasan .....	10
2.1.1 Definisi Pengawasan .....	10
2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan .....	12
2.1.3 Karakteristik Pengawasan .....	14
2.1.4 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan.....	15
2.1.5 Tahap-tahap Proses Pengawasan .....	18
2.2 Tenaga Kerja Asing.....	19
2.3 Imigrasi Kota Batam .....	22
2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
2.5 Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	29
3.3 Sumber Data .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5 Metode Analisis Data .....	35
3.6 Keabsahan Data .....	37
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kkelas I Khusus Batam .....	40
4.2 Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam .....	45

4.3 Pembahasan .....	59
4.3.1 Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.....	59
4.3.2 Penetapan Standar Pelaksana .....	60
4.3.3 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	61
4.3.4 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	63
4.3.5 Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan.....	64
4.3.6 Pengambilan Tindakan Koreksi.....	64
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
5.1 Simpulan .....	66
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

**LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA DAN DOKUMENTASI**

**LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Masuk ke Indonesia 2014-2018.....	2
<b>Tabel 1.2</b> Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kota Batam 2015-2018.....	4
<b>Tabel 1.3</b> Jumlah Pengangguran di Kota Batam 2015-2018.....	5
<b>Tabel 2.1</b> Daftar Informan .....	33

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 3.1</b> Alur Analisis Data .....	37
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.....	44
<b>Gambar 4.2</b> SOP Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 266,91 juta jiwa. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintah dituntut untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Hal ini sejalan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Sehingga, negara berkewajiban untuk kesejahteraan warga negaranya, dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara Indonesia harus terpenuhi. Kenyataannya bertolak belakang dengan yang terjadi saat ini, jumlah penganggura di indonesia semakin meningkat. Banyaknya pengangguran dipengaruhi dengan ketersediannya lapangan perkerjaan yang kurang dan terbatas yang tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang mencari perkerjaan. Faktor lain juga dipengaruhi dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini memberikan dampak pada meningkatnya penggunaan TKA di beberapa perusahaan dan tidak jarang terdapat TKA Ilegal. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan serta menekan angka pengangguran sudah selayaknya dilakukan pengawasan secara ketat terhadap

TKA yang ada di Indonesia mengingat semakin tinggi jumlah TKA asing yang bekerja di Indonesia serta banyaknya isu berkaitan adanya TKA ilegal atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Asing Yang Masuk Ke Indonesia Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah
1	2014	73.624 orang
2	2015	77.149 orang
3	2016	80.375 orang
4	2017	85.974 orang
5	2018	95.335 orang

*(Sumber: Merdeka, 2018 & Tribunnews, 2019)*

Tabel 1.1 Sesuai dengan data yang diatas jumlah tenaga asing terlihat adanya peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja asing yaitu 73.624 orang, di tahun 2015 jumlah tenaga kerja asing yang masuk mengalami kenaikan yaitu 77.149 orang, di tahun 2016 jumlah tenaga asing yang masuk bertambah yaitu menjadi 80.375 orang, lalu tahun 2017 jumlah tenaga kerja asing yang masuk sebanyak 85.974 orang dan ditahun 2018 tenaga kerja asing naik sangat dratis menjadi 95.335orang.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 4 ayat (1) perihal setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja indonesia pada semua jenis jabatan tersedia. Peraturan Undang-Undang diatas bertujuan untuk memprioritaskan tenaga kerja indonesia dibandingkan tenaga kerja asing. Namun pada kenyataannya saat ini di Indonesia kita ketahui bahwa sejumlah investor asing yang akan menanamkan modalnya keindonesia justru membawa tenaga kerja dari negara asal investor tersebut. Hal ini secara tidak langsung merugikan negara kita. Seharusnya masuknya investor asing keindonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa indonesia dalam hal penyediaan lapangan perkerjaan yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut mengurangi jumlah persentase angka pengangguran di indonesia (Virgioro et al., 2017).

Kota Batam merupakan kota yang industrinya sangat banyak. Seperti yang kita ketahui batam memiliki banyak perusahaan-perusahaan besar serta Kota Batam berdampingan langsung dengan Singapore sangat mempermudah orang asing keluar masuk kota batam untuk berkerja. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja asing yang berkerja diperusahaan kota batam dari tahun 2015-2018.



**Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam dari Tahun 2015-2018**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>2.611</b>
<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>2.700</b>
<b>3</b>	<b>2017</b>	<b>2.900</b>
<b>4</b>	<b>2018</b>	<b>3.000</b>

(Sumber: Batampos, 2018)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja asing di kota batam, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja asing dalam dalam 4 tahun terakhir mengalami terus peningkatan. Terlihat pada tahun 2015 berjumlah 2.611 orang, lalu di tahun 2016 jumlahnya naik lagi menjadi 2.700, di tahun 2017 jumlah tenaga asing meningkat jauh sebanyak 2.900 orang dan di tahun 2018 jumlah teaga asing naik menjadi 3.000 orang. Jumlah tenaga kerja yang masuk ke kota batam sangat mengkhawatirkan tenaga kerja indonesia dari survei beberapa perusahaan banyak perkerja yang sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan selama 20 tahun posisi/jabatan tidak meningkat tetap menjadi operator/buruh pabrik, sedangkan tenaga kerja asing berkerja di perusahaan yang sama jabatannya lebih tinggi *staff office* dan ada juga sebagai *manager* (Tribunnews, 2018).

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke kota Batam ini juga memicu banyaknya pengangguran di kota Batam. Karena perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing daripada tenaga kerja lokal/dibatam perusahaan menganggap bahwa tenaga kerja asing lebih mempunyai banyak skill kerja. Posisi-posisi yang semestinya bisa diisi dengan tenaga kerja lokal tapi diisi dengan tenaga kerja asing padahal dari segi pengalaman dan kemampuan tenaga kerja lokal tidak jauh berbeda kemampuannya dengan tenaga kerja asing. Melihat adanya hal tersebut berdampak besar terhadap tenaga kerja Batam karena akan banyak perusahaan lokal yang merekrut tenaga keasing hal ini akan menambah jumlah angka pengangguran di kota Batam akan meningkat.

**Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran Di Kota Batam  
Tahun 2015-2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>33.992 orang</b>
<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>24.342 orang</b>
<b>3</b>	<b>2017</b>	<b>47.364 orang</b>
<b>4</b>	<b>2018</b>	<b>54.018 orang</b>

*(Sumber: Tribunnews, 2018)*

Tabel 1.3 menjelaskan jumlah pengangguran dari tahun 2015 berjumlah 33.992 orang, di tahun 2016 jumlah penganggurannya menurun drastis menjadi 24.342 orang, di tahun berikutnya 2017 langsung naik sebesar 47.364 orang dan jumlah pengangguran di kota Batam terus menaik sebesar 54.018 di tahun 2018.

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia menjadi daya tarik bagi peneliti atau ilmuwan untuk melakukan penelitian terhadap pengawasan tenaga kerja asing di Kota Batam, sangat disayangkan hanya sedikit yang melakukan penelitian tentang permasalahan ini, Sebab Kota Batam menjadi pintu masuk bagi tenaga kerja asing. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengawasan tenaga kerja asing, pada penelitian ini, terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu *Pertama*, penelitian yang membahas mengenai Politik Hukum Dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Berkerja Di Indonesia, sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Wanda, 2017) dan (Pottag & Airlangga, 2018). *Kedua* penelitian yang membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Dalam Penanaman Modal Asing Di Hubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Vidhijasmoro, 2017) dan (Virgioro et al., 2018). *Ketiga* penelitian yang membahas tentang Eksistensi Dan Efektifitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Bandung, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Roshida & Piers 2017) dan (Ahmad, 2018). Saat ini, banyak penelitian yang membahas masalah tenaga kerja

asing seperti penelitian di atas, namun dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai efektivitas pengawasan dinas sosial dan tenaga kerja terhadap peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2015 di kabupaten Bandung. Penelitian sebelumnya yang dimaksud dilakukan oleh (Roshida & Piers, 2017).

Meskipun banyak peneliti sebelumnya yang tertarik membahas mengenai isu tentang tenaga kerja asing yang sudah disebut di atas, namun hanya sedikit yang membahas isu tentang tenaga kerja asing secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena masih kurangnya penelitian yang membahas tenaga kerja asing di Kota Batam, padahal terjadi dalam 4 tahun terakhir terjadi peningkatan tenaga kerja asing yang masuk di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui dan menganalisis pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam. Pengawasan dinas tenaga kerja Kota Batam dapat dilihat dari: (a) kemampuan dalam mengatasi tenaga kerja asing meningkat di Kota Batam dan (b) mengatasi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran. 2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi dalam mengatasi pengawasan tenaga kerja asing di Kota Batam.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I

khusus Batam dalam mengawasi tenaga kerja asing yang ada di Kota Batam. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan juga menambah literatur mengenai pengawasan tenaga kerja asing yang sebelumnya telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap tenaga kerja asing sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang yang, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan menganalisis pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Agar dapat menjadi rujukan pengembangan keilmuan yang mengarah pada Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dalam mengawasi tenaga kerja asing yang berkerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untu melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus batam.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak-pihak terkait agar dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh pihak-pihak yang berwenang yang berkaitan dengan tenaga kerja asing
2. Dapat menambah wawasan berfikir serta memperluas pandangan khususnya bagi penulis
3. Sebagai perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih lanjut tetang masalah yang sama dimasa yang akan datang. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Pengawasan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengawasan**

Secara umum, pengawasan berasal dari akar kata “awas” mendapat awal “an” dan akhiran “an” artinya adalah penilikan dan penjagaan (Murhaini, 2014:1). Sementara itu, ada satu ahli, Saiful Anwar, yang memahami bahwa perlu untuk memantau atau mengontrol tindakan aparatur pemerintah sehingga pelaksanaan tugas yang ditugaskan dapat mencapai tujuannya dan menghindari penyimpangan.

Menurut Prayudi Atmosudi Atmosudirdjo (Murhaini, 2014:3) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang ingin dihindaki, direncanakan atau diperhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah di rencanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya. Sementara pakar manajemen, M. Manullang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengeroksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Selain hal di atas dalam (Murhaini, 2014:4) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses

pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah di selenggarakan secara berkelanjutan.

Pengawasan adalah fungsi manajemen dari suatu organisasi. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan. Pengawasan memainkan peran penting karena tanpa pengawasan yang baik, tujuan yang dicapai tidak akan memuaskan. Untuk menjalankan proses pemantauan, alat manajemen diperlukan sehingga jika terjadi kesalahan dalam suatu proses, itu dapat segera diperbaiki. Selain itu, bantuan tindak lanjut ini dapat bertujuan untuk mengatur proses tindak lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pengawasan mencakup bidang pengawasan yang mendukung keberhasilan suatu organisasi, termasuk pengawasan di bidang pelayanan publik (Mukarom & Laksana, 2015:155).

Pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan standar kinerja yang telah ditentukan, rencana atau tujuan untuk menentukan kinerja yang memenuhi standar dan tindakan ini. Keterampilan penyembuhan diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan untuk mencapai tujuan. George R. Terry dalam (Mukarom & Laksana, 2015:156) mendefinisikan pengawasan dalam menentukan semua kegiatan yang telah dilakukan, yang berarti mengevaluasi kinerja pekerjaan dan, jika perlu, melaksanakan tindakan korektif sehingga pekerjaan memenuhi rencana yang direncanakan. Robbin mengatakan pengawasan adalah proses bisnis mendasar yang mengharuskan manajer untuk melakukan tugas dan pekerjaan organisasi (Mukarom & Laksana 2015:156).



Menurut Dale dalam (Mukarom &Laksana, 2015:156) menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya dengan cermat memeriksa hal-hal dan melaporkan hasil kegiatan tindak lanjut, tetapi juga menyiratkan mengoreksi dan memperbaikinya sehingga mereka mencapai tujuan mereka seperti yang diharapkan. Dan defenisi lainnya menurut Siagian dalam (Mukarom & Laksana, 2015:156) menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korelasi yang dibutuhkan.

### **2.1.2 Maksud Dan Tujuan Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang direncanakan, diperlukan pengawasan karena dengan pengawasan ini, tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting dalam menjalankan kegiatan dan tugas pemerintah sehingga pengawasan dilakukan dengan maksud untuk (Mukarom & Laksana, 2015):

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan mengambil tindakan pencegahan agar karyawan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau munculnya kesalahan baru
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat (*control sosial*) yang objektif, sehat, dan tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat dilihat bahwa tujuan pengawasan adalah untuk membandingkan pelaksanaan, rencana dan petunjuk yang telah dibuat, untuk menentukan apakah ada kesulitan, kekurangan atau kegagalan, serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk menemukan jalan keluar jika terjadi kesulitan, kekurangan, dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

### 2.1.3 Karakteristik Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2017:371) karakteristik pengawasan yang efektif adalah:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif atau lengkap.
4. Terpusat pada titik pengawasan strategi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan menyebabkan kerusakan paling fatal.
5. Realistic secara ekonomis. Biaya pelaksana harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tertentu.
6. Realistic secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok dan harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan

9. Bersifat sebagai peunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

#### **2.1.4 Bentuk Pelaksana Pengawasan**

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut (Mukarom & Laksana, 2015:158):

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti dan memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat perkerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Ada pun pengawasan tidak langsung di adakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

## 2. Pengawasan preventif dan represif

Meskipun prinsip pengawasan bersifat preventif, jika terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, prinsip ini dapat dibedakan antara pengawas preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif terkait dengan beberapa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Selama persetujuan belum diperoleh, peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan pendahuluan sebelum dimulainya pekerjaan. Misalnya, mengawasi persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lainnya. Sedangkan untuk pengawasan represif, dapat berupa penangguhan atau pembatalan. Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat ditunda atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan tingkat yang lebih tinggi dan pengawasan ini dilakukan melalui *post audit* dengan pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. .

## 3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terkait. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari luar pemerintah. Seperti pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, asalkan menyangkut semua aparatur negara dan arahan umum pengawasan keuangan negara dari

departemen dan lembaga pemerintah lainnya. Jenis pengawasan ini didasarkan pada klasifikasi pengawasan. Ada juga berbagai jenis pengawasan yang terlihat dari bidang pengawasan (Mukarom & Laksana, 2015:160), yaitu:

- a. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
- b. Pengawasan biasa (*cost control*)
- c. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- d. Pengawasan produksi (*production control*)
- e. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhorn (2001) dalam (Mukarom & Laksana, 2015:160) dapat di bagi dalam empat jenis, yaitu:

- a. Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan didepan)

Pengawasan ini dilakukan sebelum dimulainya kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kejelasan tujuan, ketersediaan arah yang tepat, ketersediaan sumber daya yang diperlukan dan perhatian terhadap kualitas sumber daya.

- b. Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan)

Pengawasan ini berfokus pada apa yang terjadi dalam proses-proses yang bertujuan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

- c. Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik)

Pengawasan ini dilakukan di akhir kegiatan. Dengan tujuan memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja masa depan dan fokus pada kualitas hasil.

d. Pengawasan *internal-eksternal*

Pengawasan internal menawarkan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sementara pengawasan eksternal melalui pengawasan dan penggunaan administrasi formal.

### **2.1.5 Tahap-Tahap Proses Pengawasan**

Tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2016:360) yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan. Setiap tipe standar dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahap-tahap lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pada tahap kedua dalam melaksanakan pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses berulang-ulang dan terus menerus.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Perbandingan kisah nyata dengan pelaksanaan yang di rencanakan atau standar yang ditetapkan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk seperti merubah standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan yang di perbaiki atau keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.

Pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dan tingkat kebenaran dari masing-masing penyimpangan ini dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk memfasilitasi pengawasan, ada cara atau teknik untuk melakukan ini.

## **2.2 Tenaga Kerja Asing**

Istilah TKA sudah menjadi fenomena yang lumrah, tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik di



dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang. Tenaga kerja asing menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud berkerja di wilayah indonesia.

Pengertian TKA di atas dapat disimpulkan bahwa TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud berkerja di wilayah indonesia, TKA yang diperkerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan izin tinggal, persyaratan izin berkerja di indonesia dan persyaratan administrasi lainnya. Di indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tenaga kerja asing diantaranya adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas dapat meningkatkan pengawasan tenaga kerja asing yang masuk dan berkerja di indonesia.

Setiap pemberi kerja yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari instansi berwenang dibidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu. Adapun, beberapan syarat dalam penggunaan TKA dalam (Septianingrum, 2017:4) berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah:

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun
3. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat
4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah berkerja lebih dari 6 bulan
5. Memiliki bukti polis asuransi yang berbadan hukum Indonesia dan Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang berkerja lebih dari 6 bulan

Dalam (Jazuli, 2018:10) pelaksanaan pengguna jasa TKA di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. *Legal*, bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003)
2. *Sponsoship*, bahwa pemberi kerja orang peorangan dilarang memperkerjakan TKA (Pasal 42 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003)
3. *Selective*, bahwa TKA diperkerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003)
4. *Security*, bahwa penggunaan tka harus sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di indonesian dan tidak membahayakan keamanan negara.

### 2.3 Imigrasi Kota Batam

Imigrasi kota Batam merupakan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Kota Batam, serta dilakukannya pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kantor imigrasi mempunyai tugas sebagai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM bidang imigrasian, salah satunya kantor imigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian (WASDAKIM) dengan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi. Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian
  - b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan
  - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia secara administratif
  - d. Pengambilan foto dan sidik jari
  - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Ieswandhary, Sundary, Tamansari, Bandung, & Rinisunday yang berjudul Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Upaya Melindungi Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia Studi Kasus Dikabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi

penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh disnaker kabupaten karawang dapat dilihat dari peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 4 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Disnaker telah menjalankan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan meskipun ada beberapaorang yang masih menyalahi aturan. Tapi pengawasan yang dilakukan disnaker kabupaten karawang dengan sangat ketat sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menekan jumlah tenaga kerja asing yang datang ke kabupaten karawang untuk mencari perkerjaan. Jurnal ini dimuat Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No 2 Tahun 2018, ISSN:2460-643X.

2. Penelitian Pottag & Airlangga yang berjudul Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Berkerja Di Indonesia. Metode yang di gunakan kualitatif. Diperlukannya penjelasan ratio legis pengaturan pengendalian tenaga kerja asing yang berkerja di indonesia yang lebih kongkrit agar warga negara indonesia semakin terjamin hak-haknya untuk berkerja di negaranya sendiri sebelum mendatangkan tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan pengaturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Jurnal ini dimuat Politik Hukum Pengendalian, Volume 1, No 2, Juni 2018. ISSN:2621-5225.
3. Peneliti Virgioro et al yang berjudul Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Penanaman Modal Asing Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisa data kualitatif. Pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal berdasarkan pemenera tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing melibatkan tiga instansi yaitu BKPM terhadap izin penanaman modal yang menggunakan tenaga kerja asing. Kemnaker terhadap izin ketenagakerjaan sebagai TKAny ditingkat pusat atau disnakertrans terhadap izin ketenagakerjaan TKA ditingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan keimigrasian terhadap visas dan paspor yang dikantongin tenaga kerja asing diindonesia. Serta mekanisme pengawasan berdasarkan perBKPM, permenaker tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, pemenera tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, UU keimigrasian secara fakta belum dilaksanakan dengan maksimal. Jurnal ini di muat Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No 2 Tahun 2018. ISSN: 2460-643X.

4. Penelitian Savira & Rahadiyan yang berjudul Keikutsertaan Indonesia Pada Masyarakat Ekonomi Asean Dan Implikasinya Terhadap Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode yang digunakan kualitatif. Pembebasan aliran tenaga kerja terdidiik sebagaimana kesepakatan MEA menuntut persiapam pemerintah indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menghadapi era liberalisasi tenaga kerja ini. Pemerintah indonesia melalui menteri tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan berbagai upaya pengaturan terhadap TKA. Pengaturan terhadap TKA dimaksud antara lain adalah pengaturan mengenai batasan penggunaan TKA dan aturan mengenai jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Melalui berbagai pengaturan yang telah dilakukan,

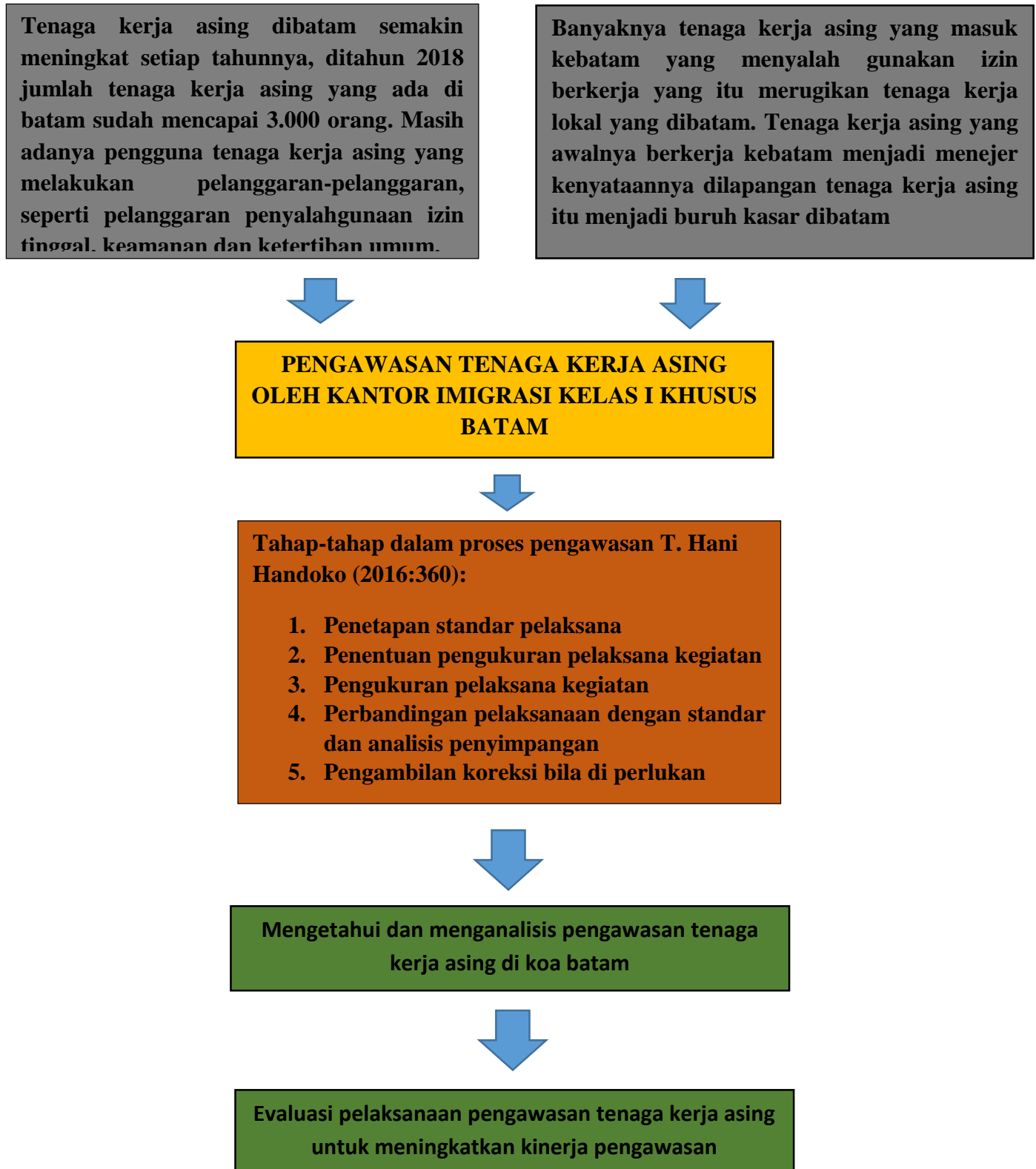
diharapkan keikutsertaan Indonesia pada MEA tidak menimbulkan dampak negatif terutama TKI dalam hal memperoleh jaminan kesempatan kerja. Jurnal ini dimuat *Falkutas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2, No 2 Tahun 2017. ISSN: 0000-0000.

5. Penelitian Nevey Varida Arianti yang berjudul *Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan*. Metode yang di gunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. Pengawasan Ketenagakerjaan dilakuka untuk memastikan keadilan dan tidak ada perlakuan diskriminatif serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Jurnal ini dimuat *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, ISSN: 1410-5632.
6. Penelitian Wahyudi & Nugroho yang berjudul *Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia*. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Intelijen Keimigrasian berperan memberikan deteksi dini terhadap setiap gangguan yang mungkin dapat terjadi yang disebabkan oleh orang asing, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (pengawasan orang asing), dimana gangguan tersebut dapat berpengaruh/mengancam stabilitas negara. Proses deteksi dini dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi seadanya namun melalui berbagai tahap pengolahan data-data orang asing (visa dan paspor) dan juga menganalisis secara

mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Jurnal ini dimuat Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12 Nomor 03 November 2018. DOI: 10.30641.



## 2.5 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan diklasifikasikan sebagai peneliti ilmiah yang dibangun berdasarkan teori yang berkembang dari penelitian dan dikendalikan berdasarkan empiris.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode survei dimana metode survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alami (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perawatan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mendistribusikan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian karena dapat memberikan arahan bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang di peroleh akan lebih spesifik. Untuk mempermudah penulis dalam mengabalisis masalah ini, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus Batam. Indikator yang di gunakan dalam pengawasantenaga kerja asing penelii ini adalah:
  - a. Penetapan standar pelaksana. Tipe standar dapat di nyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahap-tahap lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan efektif. Standar yang harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan. Penetapan standar pelaksanaan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Indikator ini bertujuan untuk menentukan apasaja yang menjadi standar yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan TKA oleh Imigrasi Klas I Batam.
  - b. Penentuan pengukuran pelaksana kegiatan. Dalam melaksanakan pengawasan dibutuhkan untuk menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Hal ini bertujuan agar adanya tolak ukur yang dipakai dalam mengukur tingkat keberhasilan sebuah pengawasan yang dilakukan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apa saja ukuran dalam menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan TKA oleh Imigrasi Klas I Batam.
  - c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses berulang-ulang dan terus menerus. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penting untuk dilakukan sebagai bentuk evalusai terhadap kegiatan pengawasan yang

telah dilakukan. Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi pengawasan TKA oleh Imigrasi Kelas I Batam.

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Perbandingan kisah nyata dengan pelaksana yang direncanakan atau standar yang ditetapkan. Tahap ini merupakan pengujian terhadap rencana dengan implementasi yang ada dilapangan. Rencana yang telah ditetapkan akan dibandingkan dengan kenyataan atau hasil yang telah dicapai. Tujuannya untuk menilai efektifitas dari rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan hasil yang telah didapat oleh Imigrasi Kelas I Batam.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk seperti merubah standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan yang di perbaiki atau keduanya dapat secara bersamaan. Tindakan ini dilakukan bertujuan untuk memperbaiki apa yang dianggap tidak sesuai agar menciptakan pengawasan yang lebih baik lagi. Indikator ini bertujuan untuk menilai apa saja bentuk koreksi atau perbaikan yang telah dilakukan oleh Imigrasi Kelas I Batam dalam melakukan Pengawasan TKA.

### 3.3 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber yang ditunjuk dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan karena informan yang menjadi peneliti merupakan informan yang relevan dalam memberikan informasi secara mendalam kepada peneliti. Berikut ini kriteria narasumber atau informan yang dipilih dalam penelitian ini:

1. Informasi benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau di luar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan
2. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran peneliti
3. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi

4. Informan dalam memberikan informasi tindak cendrung mengolah informasi terlebih dahulu serta relatif lugu ketika menyampaikan informasi.

## 2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang berbagai teori dan informasi yang diperoleh dapat berupa dokumen arsip, buku, jurnal, website, peraturan undang-undang, teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus batam dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan peneliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara mendalam, merupakan pertemuan langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat gambar guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari kantor imigrasi kelas I khusus batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Daftar Informan

NO		JABATAN	ALASAN PEMILIHAN INFORMAN
1.	Baginda Raja Harahap	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Kota Batam.	Bagian bidang pengawasan dan penindakan tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran keamanan dan overstay.
2.	Iwan Sahat	Jabatan Fungsional Ketua Tim Kantor Imigrasi Kelas I Kota Batam.	Karena pak iwan ditunjuk sama pak raja karena lebih tau permasalahannya dan lebih kompeten karena dia sebagai penjabat fungsional.
3.	Sharkan	Technical enggenering	Karena sharkan tenaga kerja asing yang sudah berkerja selama 5 tahun di PT Team Metal Indonesia.
4.	Dame	Technical Enggenering	Karena dame tenaga kerja asing yang sudah berkerja selama 7 tahun di PT Team Metal Indonesia.
5.	Goh Bin Teik	Enggenering	Karena Goh bin teik tenaga kerja asing yang beerkerja di PT JP Teknologi batam
6.	Nyi Nyi Zaw	Mechanical	Karena Nyi nyi zaw tenaga kerja asing yang beerkerja di PT JP Teknologi batam

2. Observasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan dalam narasi dalam laporan akhir dan menyusun skruktur laporan akhir.

Teknik analisis data menurut Bogdan (Sugiyono, 2016:244) yaitu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut miles dan huberman



(Sugiyono, 2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas, datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Data reduction (reduksi data)

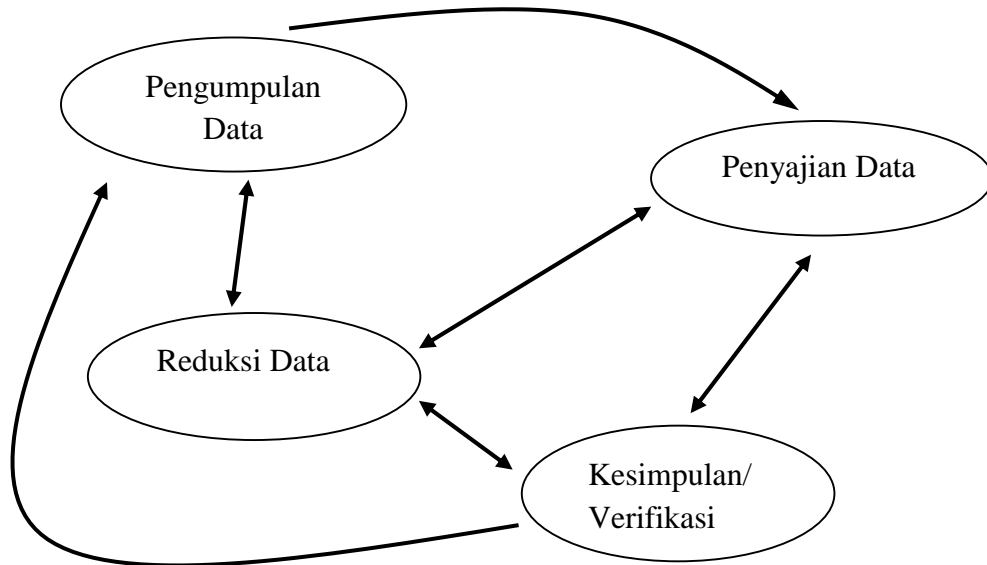
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan intinya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif atau teori.



**Gambar 3.1 Alur Analisis Data**

*(Sumber: Sugiyono, 2014:247)*

### 3.6 Keabsahan Data

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil peneliti adalah dalam melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. Adapun menurut (sugiyono, 2016:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas/kepercayaan terhadap data penelitian antara lain dengan:
  - a. Perpanjangan pengamatan dengan artian peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

- b. Menggunakan bahan referensi, hasil pengamatan yang didukung dengan gambar dan foto
- c. Triangulasi, teknik pengumpulan data dan waktu

## 2. Uji transferability

Dalam menyusun laporan peneliti harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut

## 3. Pengujian dependability

Audit terhadap keseluruhan proses penelitian

## 4. Pengujian confirmability

Menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan

### **3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian**

#### **a. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Jl. Engku Putri No.3 Batam Center Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I khusus Batam.

**b. Jadwal penelitian**

No	Kegiatan	Bulan															
		November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi pustaka	■	■	■													
2.	Penyusunan Proposal	■	■	■													
3.	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■	■	■					
4.	Penelitian Lapangan					■	■	■	■	■	■	■					
5.	Pengolahan Data						■	■	■	■	■	■					
6.	Analisis dan Kesimpulan										■	■	■				
7.	Penulisan Laporan Akhir										■	■	■				
8.	Penyerahan Laporan														■		